

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahyar Wiraguna, Sidi *et al*, (2024), *Hukum Acara Perdata*, Widina Media Utama, Bandung.
- Bambang Sutyoso, (2019), *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, (2024) *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, (2014), *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latifiani, Dian *et al*, (2022), *Panduan Beracara Perdata Secara Elektronik Bagi Pencari Keadilan*, LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- M. Hatta Ali, (2022), *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M, Arto, (2021), *Praktek Peradilan Perdata Teknis E-Court dan E-Litigasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Subekti, (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti, (2008), *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermedia, Jakarta.
- Rumawi *et al*, (2021), *Hukum Acara Perdata*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar A., (2020), *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Badan Penerbit UNM, Makassar.

Sudikno Mertokusumo, (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:
Liberty, Yogyakarta.

Sarwono, (2018), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suadi, Amran, (2024), *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada
Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahyuni, (2024), *Hukum Acara Perdata Di Era Digital*, Tohar Media, Makassar.

M. Yahya Harahap, (2016), *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang-Undang ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lembaran Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik Lembaran Negara

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik Berita Negara.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Administrasi dan Persidangan Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 (Khusus pidana E-Berpadu) Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik.

JURNAL

Andara Tsabita, et al, (2024), “Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan”. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 (4).

D.A. Putri Sukadana, (2025), “Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik”, *Jurnal Rechts*, Vol. 14 (1).

Denov Pancarani, (2024), “Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 (4).

Dewi Ratrika Rinupa Sejati, (2024), “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 (1).

Dheya Rahmawati, et al, (2024), “Hukum Di Era Digital : Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 (4).

Dwi Tatak Subagiyo, (2021), “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2.

Desi Syamsiah dkk., (2026), “Digitalisasi Pembuktian Elektronik Dalam Sengketa Wanprestasi Transaksi Fintech,” *JOSH: Journal Of Sharia*, Vol. 5 (1).

- Fauziah Lubis *et al*, (2025), “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Indonesia Journal of Law and Sosial-Politic Governance*, Vol. 5 (2).
- G. Vaustine, et al, (2024), “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5 (4).
- Graciella Azzura P A dan Livia Aurelia N, (2025), “Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court : Efisiensi dan Substansi Keadilan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 9 (1).
- Rachmawati, Imami Nur, (2007), “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 (1).
- Ummam, Khoirul et al, (2023), “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 7 (1).
- M. I. Arif dan Arif Wibowo, (2024), “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 3 (1).
- Muhammad M. Huda, Suwandi, dan A. Rofiq, (2024), “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11 (1).

- M. Alfianto Diansah dan Anajeng Esri E.D., (2023), "Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo," *Burreaucracy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3 (2).
- Mufa Mufasir, Siti Ramanda, dan Anggi Sri H. S., (2026), "Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan Atas Kegagalan Sistem Elektronik: Tinjauan Yuridis E-Court Dalam Peradilan Perdata." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 (6).
- N. A. Septiana M., et al, (2024), "Penerapan Asas Cepat Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar", *Indoensian Journal of Legality of Law*, Vol. 6 (2).
- N. L. G. Saraswati, et al, (2024), "Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Gianyar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5 (1).
- N. W. J. Timbeng, et al, (2023), "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B". *E-Journal Komunikasi Yustisia*. Vol. 6 (1).
- Putri Nini R. S. W. dan Kurniawan Sarototonafo Zai, (2023), "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli", *Jurnal EMBA*, Vol. 11 (4).

- Rakhyu Swarnabumi R. R. dan Mulida Hayati, (2021), “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 (2).
- Setiawan, Annisa Dita, et al, (2021), “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 (2).
- Sindi Triana dan Ferry Chofa, (2025), “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5.
- Sitti Mania, (2008), “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran”, *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 (2).
- Siti Nur I., Arifudin, dan Juliani, (2022), “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi”. *Veritas : Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol 8 (1).
- Titin Pramiyati, et al, (2017), “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus : Skema Konseptual Basisdata Simbumil)”, *Jurnal Simetris*, Vol. 8 (2).
- Ummi Maskanah, (2023), “Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi : E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Modern di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 9 (2).
- Ummi Maskanah, (2023), “Tantangan dalam Pembaharuan sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana

Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 9 (2).

Yati Nurhayati, et al, (2021), “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 (1).

WEBSITE

Kekuasaan Kehakiman. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>. Diakses Pada 23 Desember 2025

Mahkamah Agung RI. “E-Court Mahkamah Agung RI”. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 November 2025.

Penegak Hukum, “Wanprestasi : Pengertian, Unsur, dan Solusinya”. *Penegak Hukum Com.* 21 Juni 2024. <https://www.penegakhukum.com/2024/06/wanprestasi-pengertian-unsur-dan.html>. Diakses pada 23 Oktober 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dikutip Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>. Dikses Pada 23 Desember 2025

LAIN-LAIN / SKRIPSI

Ahmad Kevin Budirahmadi. “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”. 2021. Skripsi. Repositori UPN Veteran Jawa Timur. Surabaya.

Herdian Fakhurrozy Albani dan Itok Dwi Kurniawan, (2025), “IMPLEMENTASI E-COURT PADA PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB”, *Verstek*, 13(3). DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.107853>

Megat Ahmad Sahrani, 2024, Skripsi: “Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara E-Court Di Pengadilan Negeri Tuban (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tuban)”. (Malang: UMM).

Syarifah, Dyah Ayu, (2023), “*Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*”, Skripsi, IAIN Ponorogo.